



MENAPAK ASA PENDIDIKAN INKLUSIF DARI TEPIAN NUSANTARA

MENAPAK ASA PENDIDIKAN INKLUSIF DARI TEPIAN NUSANTARA



Co-Funded by
the European Union



Member of
act:ionaid

Local Partner:

MENAPAK ASA PENDIDIKAN INKLUSIF DARI TEPIAN NUSANTARA

Penasihat

Hendrik Rosdinar

Penulis

Rokhmad Munawir, Hardiyanto, Ari Wahyudi Susatyo,
dan Sari Wijaya

Fotografi

Adrian Mulya, Team YAPPIKA-ActionAid

Desain Grafis

Bobby Haryanto

Alamat

Jl. Basuki Rahmat RT 006 RW 010, Unit 7
(Kompleks Ruko YAMAHA),
Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur 13410

Cetakan pertama, November 2021

©2022, YAPPIKA-ActionAid (Fotografi dan Copyright)

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, menyalin, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin
tertulis dari pemegang hak cipta.

*All rights reserved. No part of this publication may be
reproduced, distributed, or transmitted in any form or by
any means, including photocopying, recording, or other
electronic or mechanical methods, without the prior written
permission of the publisher*

Daftar Isi

Preface 5

Kata Pengantar 6

Tentang YAPPIKA-ActionAid 8

Launching Pro-InQluEd 10



Preface

Ambassador of the European Union to Indonesia and Brunai Darussalam

The European Union provides support to YAPPIKA-ActionAid and its partners in the Promoting Civil Society-led Initiative for Inclusive and Quality Education in Indonesia (Pro-InQluEd) Program, where this program aims to promote good governance and accountability in the education sector in Indonesia, in line with the achievement of indicator #4 of the Sustainable Development Goals (SDGs) through the active involvement of civil society in the development process.

For 4 (four) years, this program has produced many major achievements, including advocacy efforts carried out by the school community and a network of CSOs in three regions which resulted in the obtaining of aid funds for school infrastructure improvements, sourced from the Central Government and Regional Government Budgets as well as CSR from national and local companies. It has also been able to strengthen the capacity of the school community to practice transparency and accountability in budget governance.

The program also succeeded in encouraging all assisted schools (30 schools) to publish the School Budget Document (RKAS) through information boards and the distribution of RKAS pocket books to parents. Members of the school community have increased their capacity in public service oversight, policy advocacy and government budget analysis. This is a success and we are very proud of this achievement.

This book summarizes some of the stories and recordings of these successes, and is intended for the program beneficiaries and all Indonesian society. We hope that this book will serve as an appreciation and inspiration for the development of education and community empowerment so that they can transform into a better, stronger, and more qualified in the future.

H.E. Vincent Piket

Ambassador of the European Union to Indonesia and Brunai Darussalam

Kata Pengantar

Direktur Eksekutif YAPPIKA-ActionAid

Sejak 2018 hingga akhir 2021 YAPPIKA-ActionAid mengelola Program Promoting Civil Society-led Initiative for Inclusive and Quality Education in Indonesia atau disingkat menjadi Pro-InQluEd, yang didanai oleh European Union (EU). Dalam program ini YAPPIKA-ActionAid bermitra dengan 3 organisasi, yaitu Lembaga Gemawan di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Perkumpulan SOLUD di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, dan Yayasan Bahtera di Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur.

Program ini bertujuan untuk mempromosikan tata kelola dan akuntabilitas yang baik di sektor pendidikan di Indonesia, sejalan dengan pencapaian indikator #4 dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui keterlibatan masyarakat sipil yang aktif dalam proses pembangunan publik. Pada level outcome proyek ini bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkannya kerja sama antara organisasi masyarakat sipil (*Civil Society Organization/CSO*) dengan Pemerintah Daerah (*Local*

Authorities) untuk secara efektif mengimplementasikan inisiatif untuk terwujudnya pendidikan inklusif dan berkualitas di 3 kabupaten wilayah kerja.

Program ini memiliki fokus utama, yaitu: (1) menguatnya kapasitas CSO (organisasi dan teknis) untuk berpartisipasi aktif dalam tata kelola Pemerintah Daerah (Pemda) dan mempengaruhi kebijakan pendidikan dasar sehingga lebih progresif, berkualitas dan inklusif; (2) menguatnya kapasitas komunitas sekolah untuk berpartisipasi dalam proses tata kelola pemerintahan daerah dan melakukan pemantauan anggaran Pemda untuk pendidikan dasar dan penyediaan pelayanan perlindungan hak-hak pendidikan; (3) meningkatnya kerja sama antara masyarakat sipil, Pemda dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) untuk meningkatkan pengawasan terhadap akses dan kualitas pendidikan dasar; dan (4) meningkatnya kerja sama antara CSO dan media dalam advokasi dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran mengenai pendidikan dasar.

Selama 3,5 (tiga setengah) tahun program ini berjalan telah menghasilkan berbagai capaian utama, diantaranya adalah upaya advokasi yang dilakukan oleh komunitas sekolah, dan jaringan CSO di tiga daerah membuahkan hasil dengan diperolehnya dana bantuan perbaikan infrastruktur sekolah, yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta CSR perusahaan nasional dan lokal.

Program telah berhasil memperkuat kapasitas komunitas sekolah dalam mempraktikkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola anggaran. Program juga berhasil mendorong seluruh sekolah dampingan (30 sekolah) untuk mempublikasikan Dokumen Anggaran Sekolah (RKAS) melalui papan informasi dan buku saku RKAS untuk diberikan kepada orang tua siswa. Anggota komunitas sekolah telah meningkat kapasitasnya dalam pengawasan pelayanan publik, advokasi kebijakan dan analisis anggaran pemerintah. Dalam melakukan advokasi kebijakan, komunitas sekolah telah melengkapi dirinya dengan usulan kebijakan berbasis bukti, sehingga ketika melakukan dialog dengan pemerintah memiliki basis argumentasi yang kuat. Meningkatnya kapasitas komunitas sekolah dalam advokasi kebijakan

merupakan faktor utama keberhasilan mereka dalam mengakses alokasi dana bantuan perbaikan infrastruktur sekolah. Komunitas sekolah juga telah menghasilkan berbagai inisiatif dan inovasi dalam keberlanjutan komunitas sekolah, seperti inisiatif dalam mengembangkan pangan lokal, usaha kecil yang dikelola oleh komunitas khususnya para perempuan, serta inisiatif dalam memperbaiki dan menjaga sekolah, seperti pembuatan pagar dan lapangan olah raga yang dilakukan bersama oleh para anggota komunitas.

Buku ini merangkum sebagian rekaman atas keberhasilan-keberhasilan tersebut. Buku ini diperuntukkan bagi para pemangku hak program di lokasi program serta seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Kami berharap buku ini menjadi sebagai sebuah penghargaan dan inspirasi bagi pengembangan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat agar dapat bertransformasi menjadi lebih baik, lebih tangguh, lebih berkualitas di masa depan

Salam Hormat,

Fransisca Fitri

Direktur Eksekutif YAPPIKA-ActionAid

Tentang YAPPIKA-ActionAid

Cikal bakal YAPPIKA berawal sejak tahun 1991 dengan terbentuknya Yayasan Persahabatan Indonesia Kanada (YAPIKA) atau Forum Indonesia Kanada (The Indonesia-Canada Forum/ICF). Fungsi YAPIKA pada saat itu adalah sebagai lembaga yang menyalurkan dana kepada organisasi-organisasi nirlaba di Indonesia. Kepengurusan YAPIKA adalah kolektif antara organisasi-organisasi nirlaba Indonesia dan Kanada. Pada tahun 1997, YAPIKA mengalami perubahan menjadi Lembaga Indonesia dan menambah peran-perannya untuk meningkatkan kapasitas organisasi-organisasi nirlaba Indonesia, melakukan advokasi kebijakan nasional pada isu-isu tertentu yang menjadi fokus perhatiannya. Nama YAPIKA pun berubah menjadi Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA).

Mulai tahun 2016, YAPPIKA menjadi anggota Federasi ActionAid Internasional. ActionAid adalah federasi organisasi nirlaba yang beranggotakan organisasi-organisasi nirlaba di 45 negara, di mana memiliki misi beririsan, yaitu memerangi kemiskinan dan ketidakadilan. YAPPIKA-ActionAid melakukan kampanye dan advokasi program-program pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, memperkuat kapasitas kelembagaan organisasi masyarakat sipil, dan mempromosikan kebebasan berserikat di dalam bingkai sistem demokrasi. Program-program dilakukan baik secara langsung maupun dengan mitra lembaga nirlaba lainnya dan masyarakat guna memastikan pemenuhan hak masyarakat terpinggirkan, terutām anak-anak, perempuan, dan minoritas.. ■



Launching Pro-InQluEd

Program Pro-InQluEd diluncurkan secara resmi pada 18 Mei 2018 oleh Mr. H.E. Vincent Guérend (EU Ambassador to Indonesia and ASEAN) dan Bapak Thamrin Kasman (Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud) bertempat di Kantor Kemendikbud. Dalam agenda launching ini juga dihadiri Reza Rahadian (Duta Persahabatan YAPPIKA-ActionAid).

Selain itu juga dihadiri oleh Direktur YAPPIKA-ActionAid; Ketua Pembina YAPPIKA-ActionAid; Direktur GEMAWAN; Ketua Perkumpulan SOLUD; Direktris Yayasan Bahtera; Tim Pelaksana Program Pro-InQluEd YAPPIKA-ActionAid; Tim Pelaksana Program Pro-InQluEd di 3 (tiga) kabupaten. Perwakilan Pemerintah Daerah sasaran program dan para pihak di Kementerian Pendidikan; perwakilan KemenPAN/RB; Ombudsman RI juga hadir dalam acara peluncuran program ini.

Sebelum acara launching ini, dilaksanakan Edu-Talk Vlog antara Mr. H.E. Vincent Guérend (EU Ambassador to Indonesia and ASEAN) dengan

Reza Rahadian (Duta Persahabatan YAPPIKA-ActionAid). Edu-Talk Vlog ini membahas mengenai situasi terkini dan dukungan EU untuk Indonesia melalui YAPPIKA-ActionAid.

Kegiatan ini juga dihelat *talkshow* dengan narasumber Fransisca Fitri (Direktur YAPPIKA-ActionAid); Meuthia Gani (Ketua Pembina YAPPIKA-ActionAid); Mr. H.E. Vincent Guérend (EU Ambassador to Indonesia and ASEAN) dan Bapak Thamrin Kasman (Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud), yang memaparkan mengenai situasi Pendidikan di Indonesia dan upaya-upaya kolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada tersebut.

Kegiatan launching ditutup dengan melakukan cap tangan dengan cat warna-warni sebagai symbol inklusif sebagaimana agenda besar dalam program ini untuk mendorong Pendidikan inklusif dan sekolah aman di Indonesia. ■



Mr. Vincent Guérend (Ambassador, European Union Delegation of Indonesia, Brunei, and ASEAN); Reza Rahadian (Goodwill Ambassador YAPPIKA-ActionAid); Fransisca Fitri (Direktur Eksekutif YAPPIKA-ActionAid); Hetifah Sjaifudian (Komisi X DPR RI); Meuthia Ganie Rahman (Chair of Board YAPPIKA-ActionAid) berfoto bersama dengan perwakilan dari Kemendikbud dan European Union Delegation



Fransisca Fitri (Direktur Eksekutif YAPPIKA-ActionAid) menyerahkan rekomendasi dan nota kesepahaman kepada Hetifah Sjaifudian (Komisi X DPR RI, sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan program



Reza Rahadian (Goodwill Ambassador YAPPIKA-ActionAid) memberikan sambutan pembukaan



Tim Program Pro-InQluEd dari YAPPIKA-ActionAid; Lembaga Gemawan; Yayasan Bahtera dan Perkumpulan SOLUD berfoto bersama



Mr. Vincent Guérend (Ambassador, European Union Delegation of Indonesia, Brunei, and ASEAN) memberikan cap tangan sebagai bentuk dukungan terhadap program. Cap tangan berwarna-warni adalah simbol inklusif



Infrastruktur



**KERUSAKAN
INFRASTRUKTUR
SEKOLAH DI INDONESIA
SANGAT BESAR.
DAN INI TENTUNYA
MEMBAHAYAKAN
PARA SISWA,
GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN.**

Program Promoting Civil Society-led Initiatives for Inclusive and Quality Education in Indonesia Pro-InQluEd yang dilaksanakan oleh YAPPIKA-ActionAid atas dukungan dari European Union, bekerja di 3 (tiga) kabupaten, yakni Kabupaten Sambas (Kalimantan Barat), Kabupaten Bima (Nusa Tenggara Barat), Kabupaten Sumba Barat (Nusa Tenggara Timur), dimana salah satu tujuannya adalah mendorong perbaikan infrastruktur Pendidikan (Sekolah Dasar).

Program ini menasar 10 (sepuluh) sekolah di masing-masing kabupaten lokasi program. Dalam melakukan advokasi perbaikan infrastruktur sekolah, program ini melakukan

penguatan terhadap Komunitas Sekolah¹ untuk mampu melakukan advokasi dan program juga memfasilitasi mereka dengan membuka ruang-ruang dialog dengan pemerintah daerah.

Dalam perjalanan program sejak tahun 2018, telah berhasil memberikan peningkatan kapasitas kepada 993 orang anggota komunitas sekolah dan telah mampu berkontribusi pada perbaikan infrastruktur sekolah, khususnya sekolah yang menjadi sasaran program.

Ada 9 (sembilan) komunitas sekolah di Kabupaten Sambas yang telah berhasil mengadvokasi perbaikan ruang kelas dengan mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan APBD serta ada yang berhasil memperbaiki dengan menggunakan dana CSR dan donasi publik.

Di Kabupaten Bima ada 6 (enam) sekolah yang berhasil diupayakan untuk mendapatkan alokasi anggaran DAK dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Sementara di Kabupaten Sumba Barat ada 9 (Sembilan) sekolah yang

mendapatkan alokasi perbaikan infrastruktur dari alokasi anggaran DAK tahun 2019 hingga 2021, sedangkan 1 (satu) sekolah lagi juga telah berhasil mendapatkan komitmen perbaikan di tahun 2022.

Ini tentunya masih jauh dari jumlah ruang kelas dan sekolah rusak di Indonesia. Namun semua ini setidaknya telah berhasil menyelamatkan ratusan siswa dari bahaya. Kerusakan bangunan sekolah dan ruang kelas tentu sangat membahayakan siswa.

Kerusakan infrastruktur sekolah di Indonesia sangat besar. Dan ini tentunya membahayakan para siswa, guru dan tenaga kependidikan ketika mereka sedang beraktivitas di sekolah. Berdasarkan data yang diolah oleh YAPPIKA-ActionAid, 1 (satu) dari 5 (lima) anak di Indonesia terancam bahaya karena kerusakan infrastruktur sekolah. ■

¹ Komunitas Sekolah beranggotakan kepala sekolah, guru, orang tua siswa, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tenaga kependidikan sekolah, dan pemerhati pendidikan di wilayah sekolah tersebut

**“SETIAP HARI KAMI
HARUS MERASA
KHAWATIR KARENA
RUANG KELAS KAMI
RUSAK, DAN INI TENTU
DAPAT MEMBAHAYAKAN
KAMI.”**



Seorang murid mengintip dari kaca jendela yang berlubang.



Fasilitas sekolah yang kurang memadai di SDN Kabupaten Sambas.



Fasilitas sekolah yang kurang memadai di SDN Kabupaten Sambas.



Atap Perpustakaan di salah satu SDN Kabupaten Sambas



Ruang Perpustakaan di salah satu SDN Kabupaten Sambas



Perpustakaan SDN di Kabupaten Sambas



Ruang Kelas SDN di Kabupaten Sambas



Ruang Kelas SDN di Kabupaten Bima





Kegiatan Pemotongan Pita oleh Bupati Bima saat serah terima rehab SDN di Kabupaten Bima 2021



Kondisi toilet SDN di Sumba Barat sebelum rehab





Kondisi toilet SDN di Sumba Barat pasca rehab



Ruang Kelas SDN di Sumba Barat sebelum rehab



**“SEKOLAH HARUS MENJADI
RUMAH KEDUA BAGI SISWA,
TEMPAT YANG HANGAT DAN
NYAMAN UNTUK BELAJAR,
NAMUN SAAT INI 1 (SATU)
DARI 5 (ANAK) ANAK
INDONESIA JUSTRU TERANCAM
BAHAYA KARENA KERUSAKAN
INFRASTRUKTUR SEKOLAH.”**



Ruang Kelas SDN di Sumba Barat pasca rehab



Ruang Kelas SDN di Sumba Barat pasca rehab



Ruang Kelas SDN di Sumba Barat sebelum rehab



Kondisi papan tulis SDN di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.





SDN di Kabupaten Sumba Barat.



SDN Inpres di Kabupaten Bima



SDN Inpres di Sumba Barat pasca rehab



SDN Inpres di Sumba Barat sebelum rehab



PEMERINTAH KABUPATEN

SUMBA BARAT

DINAS PENDIDIKAN

SD INPRES

HOBA JANG





SD Inpres di Kabupaten Sumba Barat





Kegiatan Murid SDN di Kab. Bima di Perpustakaan

**“KAMI MEMBUTUHKAN
RUANG KELAS YANG
BAIK DAN AMAN UNTUK
DAPAT MENUNJANG
KEGIATAN BELAJAR KAMI.
KALAU RUANG KELASNYA
RUSAK, KAMI KHAWATIR
AKAN TERLUKA KETIKA
BELAJAR.”**





Partisipasi Masyarakat



Ibu-ibu Komunitas Sekolah di Kabupaten Sambas



**“SEMUANYA DIAWALI
DENGAN TRANSPARANSI,
KETERBUKAAN ADALAH
AWAL KETERLIBATAN.
TANPA KETERBUKAAN
TIDAK ADA KEPERCAYAAN
DARI MASYARAKAT.”**

Pagar di depan SD inpres Hobajangi itu terlihat sederhana, hanya bambu yang dicat dengan warna kuning biru. Di belakangnya terlihat berbagai tanaman bunga di muka kelas, menghiasi bangunan sekolah yang terletak di antara ladang dan bukit-bukit batu desa Bali Loku.

Pagar sederhana yang belum lama diselesaikan oleh orang-orang tua siswa ini akan melindungi sekolah dari gangguan ternak-ternak yang berkeliaran di sekitar lingkungan sekolah. Sebagian besar dari orang tua siswa itu adalah perempuan, ibu-ibu rumah tangga dari keluarga petani sebagaimana umumnya penduduk desa tersebut. Sudah tiga tahun terakhir mereka bergabung dalam Komunitas Sekolah dan melakukan kegiatan bersama para guru. Tujuannya satu, membuat sekolah lebih baik agar anak-anak mereka bisa belajar dengan nyaman.

Dari pertemuan-pertemuan yang diadakan mereka belajar banyak hal seperti anggaran dan program-program pendidikan, Kegiatan Belajar Mengajar, dan infrastruktur yang memadai.



SD Inpres di Kabupaten Sumba Barat

Bahkan selama dua tahun terakhir mereka terlibat dalam penyusunan anggaran bersama pihak sekolah.

Di awal kegiatan Komunitas Sekolah, kondisi bangunan sekolah dalam kondisi rusak dan memprihatinkan. Lewat pertemuan-pertemuan yang didampingi oleh program Pro-InQluEd mereka melakukan konsolidasi untuk mencari penyelesaian, sekolah segera melakukan *update* data infrastruktur di sistem DAPODIK (Data Pokok Pendidikan), agar kondisi sekolah diketahui oleh Kementerian dan Dinas pendidikan.

Sementara itu komunitas dengan didampingi Yayasan Bahtera, Sumba

Barat, aktif menyampaikan permasalahan tersebut pada pemangku kepentingan di Kabupaten Sumba Barat, seperti DPRD dan Dinas Pendidikan. Aksi kolaboratif ini membuahkan hasil, tahun 2019, SDI Hobajangi mendapatkan dana rehab infrastruktur untuk 8 ruangan yang dimanfaatkan sebagai ruang kelas dan ruang guru.

Lantas bagaimana para orang tua siswa itu bisa rela

menyediakan waktu dan tenaga untuk terlibat mengurus sekolah? Jamak terdengar bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama, seperti juga diamanatkan undang-undang tentang sekolah, keluarga, dan masyarakat sebagai kesatuan unsur pendidikan. Namun demikian, implementasinya di lapangan meninggalkan banyak pertanyaan. Seperti apa bentuk keterlibatan dan bagaimana memulainya.

Menurut Obed Ledi, Kepala sekolah SDI Hobajangi, semuanya diawali dengan transparansi. Keterbukaan adalah awal keterlibatan. Setelah mendapatkan materi mengenai anggaran pendidikan, mereka mengetahui berapa Biaya



Pertemuan Komunitas Sekolah SDN di Sange Mangge

Operasional Sekolah, berapa biaya dan dari mana anggaran infrastruktur berasal, serta anggaran-anggaran lain untuk pengelolaan sekolah.

Pihak sekolah memberikan informasi pada orang tua siswa sesuai fakta yang ada tanpa menyembunyikan apa pun. Di situ muncul kepercayaan dan pemahaman para orang tua bahwa apa yang ada tidak mencukupi dan sekolah tidak bisa ditinggalkan sendiri. Hal ini yang membuat mereka membawa bilah-bilah bambu dari rumahnya dan bergotong royong membuat pagar sekolah, karena dana rehab infrastruktur

yang baru saja turun memang tidak mencakup pembuatan pagar.

Dalam program Pro-InQluEd yang dikawal oleh YAPPIKA-ActionAid, partisipasi masyarakat lewat Komunitas Sekolah diusahakan ada dalam setiap level pengelolaan sekolah, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Hal ini menghilangkan kesan bahwa warga hanya diajak terlibat saat dibutuhkan saja, namun memang terlibat utuh sehingga memunculkan tanggung jawab bersama yang kuat. Sebagai contoh, dalam perencanaan mereka terlibat dalam penyusunan anggaran



(RKAS) yang partisipatif dan pengusulan siswa-siswa calon penerima Program Indonesia Pintar.

Dalam implementasi mereka terlibat dalam pengelolaan anggaran seperti penggunaan dana rehab infrastruktur, sehingga penggunaan anggaran bisa transparan, akuntabel, dan efektif. Dalam evaluasi, mereka ikut menilai efektifitas penggunaan dana BOS dan dana bantuan Program Indonesia Pintar untuk siswa kurang mampu.

Tanggung jawab yang muncul dari keterlibatan menyeluruh ini semakin menguatkan kolaborasi-kolaborasi untuk mengatasi permasalahan yang berbeda pada tiap sekolah. Di SDN Tamang Sagang, Kabupaten Sambas, Komunitas Sekolah memanfaatkan pekarangan sekolah yang luas dan tidak terurus sebagai kebun gizi. Berbagai sayuran ditanam di sana, terong, oyong, dan banyak lagi. Hasilnya bisa dibagikan ke orang tua siswa sebagai penambah gizi anak dan bisa juga dijual untuk menambah biaya operasional sekolah. Inisiatif yang unik seperti ini harus dipelihara dan ditumbuhkan di sekolah-sekolah lain. Ikatan yang muncul antara sekolah dan warga menjadikan pengelolaan sekolah lebih optimal dan efektif, selain itu juga menjadi pembelajaran bagi Pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan untuk mendorong bentuk-bentuk partisipasi warga yang lebih beragam. ■



Ibu-ibu Komunitas Sekolah SDN Inpres di Kab. Bima, Nusa Tenggara Barat

“Usaha kerupuk ini kami jadikan sebagai semangat kami, karena kami ingin nambah penghasilan ibu-ibu, ada kegiatan EE di kelompok, silarutahmi, dan mudah-mudahan hasil bisa memuaskan.”



Kelompok Usaha Kerupuk Ibu-ibu Komunitas Sekolah SDN di Kabupaten Sambas.



Ibu-ibu Komunitas Sekolah SD di Kabupaten Sumba Barat.





Kegiatan Belajar Mengajar SD di Sumba Barat.

“Masyarakat dilibatkan dalam setiap level pengelolaan sekolah; perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Hal ini menghilangkan kesan bahwa mereka hanya diajak terlibat saat dibutuhkan saja.”



Komunitas Sekolah SDN di Kabupaten Sambas dan GEMAWAN



**“SAYA AKTIF
TERLIBAT DALAM
KOMUNITAS
SEKOLAH, SELAIN
KARENA SAYA
ORANGTUA MURID,
SAYA JUGA INGIN
MENGETAHUI APA
YANG TERJADI DI
SEKOLAH DAN PEDULI
DENGAN KONDISI
SEKOLAH.”**

Salah satu anggota Komunitas Sekolah SDN di Kab. Bima



Kepala Sekolah SDN di Kab. Bima

“SAYA TERLIBAT AKTIF DALAM KOMUNITAS SEKOLAH DAN BERPERAN DALAM MELAKUKAN WAWANCARA ORANGTUA DALAM PROSES MENDAPATKAN KIP. MESKIPUN BELUM BANYAK SISWA DI SDN RITE 2 YANG MENDAPATKAN KIP, NAMUN KINI KAMI LEBIH MEMAHAMI PROSES PENGISIAN DATA DAN PENGAJUAN KIP. DAN DENGAN ADANYA KOMUNITAS SEKOLAH, PIHAK SEKOLAH MENJADI LEBIH TERBUKA DENGAN PIHAK LUAR SEHINGGA LEBIH MUDAH BERKOORDINASI UNTUK MENGATASI PERMASALAHAN SEKOLAH.”



Salah satu Community Organizer dari Gemawan Kab. Sambas

“KALAU MENURUT SAYA YA, INI KOMUNITAS SEKOLAH, KOMITE SEKOLAH YANG KITA DAMPINGI INI KAN SUDAH MULAI MANDIRI, TANPA ADANYA PENDAMPINGAN GEMAWAN, MEREKA SUDAH MANDIRI, ADA YANG BERAKTIVITAS KEBUN SEKOLAH, ADA YANG SUDAH MEMANFAATKAN LAHAN PEKERANGAN SEKOLAH MENJADI LAHAN PERTANIAN, HARAPANNYA TENTU SEMOGA TETAP TERUS BERJALAN.”

“HARAPAN KITA LAH MUDAH-MUDAHAN KERJA SAMA KITA YANG SUDAH SOLID, YANG SUDAH BERJALAN DENGAN BAIK, DENGAN BAGAIMANA KITA MENGUBAH MINDSET YANG ADA, DAN TENTU TIDAK MUDAH SEPERTI KITA MEMBALIKKAN TELAPAK TANGAN, PERLU PROSES, SEHINGGA MUNGKIN SATU LANGKAH DEMI LANGKAH BISA DIUBAH KE DEPANNYA. JADI PADA DASARNYA KITA TETAP SALING MENDUKUNG SEKOLAH YANG ADA, WALAUPUN SEKOLAH ITU ADALAH WEWENANG ATAU DOMAIN DARI DINAS PENDIDIKAN, KITA AKAN BERUPAYA UNTUK FASILITASI, INTERVENSI, JADI SALAH SATUNYA MISALKAN SEKOLAH ITU PERLU BANGUNAN, BAGAIMANA BANGUNAN ITU UNTUK MENGUSULKANNYA MELALUI MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DESDA (MUSRENBANGDES), NANTI DARI DESA MENGUSULKAN SEKOLAH INI KURANG INI, KEMUDIAN DINAS PENDIDIKAN YANG MEMFASILITASI DAN LAIN SEBAGAINYA.”



Kepala Desa Piantus, Kecamatan Sejangkung, Kab. Sambas



Koordinator Komunitas Sekolah
SDN di Kabupaten Sambas.

“SECARA LANGSUNG, BELUM PERNAH MENYUARAKAN SECARA LANGSUNG TERKAIT HAL INI, KHAWATIR ADA KERENGANGAN GITU, PIHAK SEKOLAH BISA TERSINGGUNG, NAMUN HINGGA SAAT INI BELUM ADA UNDANGAN TERKAIT PENGELOLAAN BOS, DITAMBAH LAGI KONDISI COVID 19 SAAT INI TAK ADA KEGIATAN SAMA SEKALI YA.”

“RENCANA SAYA SIH INGIN
LEBIH MENINGKAT LAGI, DENGAN
CARA MENINGKATKAN KUALITAS
PENDIDIKAN DI SEKOLAH,
MASYARAKAT LEBIH DILIBATKAN,
ANTARA SEKOLAH, KOMITE DAN
MASYARAKAT, LEBIH JUGA KEPADA
HAL2 AGAMA, BAGI SAYA, TETAP
AKAN MENDAMPINGI SEKOLAH,
SEKOLAH UNTUK MASYARAKAT,
BAGAIMANA PUN CARANYA HARUS
TETAP MAJU BEGITU YA.”



Koordinator Komunitas Sekolah SDN di Kabupaten Sambas



Kepala Sekolah SDN di Kab. Sambas

**“YA JADI GURU TADI, KARENA
YA TETAP HARUS MENGAJAR,
MEMBERIKAN TUGAS, TAPI DI WAKTU
LAIN JUGA ADA PANGGILAN DARI
DINAS BEGITU, JADI RASA MASIH ADA
HUTANG DENGAN ANAK-ANAK UNTUK
MENJELASKAN MATERI PELAJARAN
BEGITU, SEPERTI ADA PANGGILAN
DINAS, ADA KEGIATAN PROGRAM DARI
GEMAWAN.”**

**“SEJUJURNYA PADA SAAT
DITUNJUK DAN MENGIKUT
KEGIATAN PROGRAM
MERASA BINGUNG, IN
BENTUKNYA BAGAIMANA
DAN TUJUANNYA KE
MANA, DENGAN ADANYA
PERTEMUAN RUTIN DI
SEKOLAH, DI SITU SAYA
PAHAM BETUL BAHWA INI
ADALAH UNTUK MUTU
PENDIDIKAN, JADI SAYA
SEMAKIN TERTARIK.”**





“SAYA MELIHAT SAAT
INI MASYARAKAT JAUH
LEBIH MENERIMA
SISWA **ABK** UNTUK
BERSEKOLAH DI SEKOLAH
UMUM DAN BERMAIN
BERSAMA TEMAN-TEMAN
SEBAYANYA.”

Guru SDN di Kabupaten Bima

“MENURUT SAYA PENDIDIKAN SANGAT PENTING, KARENA SAYA HANYA TAMAT SD, SANGAT MENYESAL SEKALI, KARENA ORANG TUA DULU MENYEKOLAHKAN KITA TAK MAMPU, CARI MAKAN SAJA SUSAH, APALAGI SEKOLAH, MESKI TAK JADI PEGAWAI, TAPI DIA MENCARI DUIT SENDIRILAH, KALAU TAK SEKOLAH, MEMANG AGAK SUSAH, ANAK HARUS SEKOLAHKAN MESKI SESAKIT APAPUN. MUDAH-MUDAHAN PEMERINTAH BISA MENYAMPAIKAN KE PUSAT.



Ketua Komite Sekolah SDN
di Kab. Sambas



"YANG INGIN DILAKUKAN SETELAH
BERHASIL MEMPERJUANGKAN
RUANG KELAS SEKOLAH,
RENCANA SELANJUTNYA ADALAH
INGIN MEMELIHARA GEDUNG
YANG SUDAH DI REHAB, SUPAYA
NANTINYA JIKA ADA YANG RUSAK²
RINGAN, BISA DIPERBAIKI,
DIRAWAT, KARENA JIKA TAK
DIPERBAIKI, LAMA-LAMA KAN
BISA RUSAK., DAN TENTU JUGA
SISWA BISA MENGEJAR PRESTASI,
DENGAN GEDUNG YANG LAYAK,
SISWA BISA BELAJAR DENGAN
TENANG, ADALAH DI ANTARA
SISWA YANG BISA BERHASIL
DAN MENGHARUMKAN NAMA
SEKOLAH."



Guru SDN di Kab. Bima

**“SAYA LEBIH PERCAYA
DIRI DALAM MENDAMPINGI
MURID ABK KARENA
MENDAPATKAN PENGETAHUAN
DAN PELATIHAN YANG
DIBUTUHKAN.”**



A middle-aged man with dark hair, wearing a white short-sleeved button-down shirt, is seated at a desk covered with a yellow cloth. He is looking directly at the camera with a neutral expression. His hands are resting on the desk. To his right, a laptop is partially visible. In the background, there is a wooden cabinet and a globe on a desk.

**“SETELAH TERBENTUK
KOMUNITAS SEKOLAH,
PARTISIPASI MASYARAKAT,
GURU DAN ORANGTUA
MURID CUKUP AKTIF.
KOMUNIKASI PIHAK
SEKOLAH DAN PEMERINTAH
LOKAL JUGA TERJALIN
DENGAN BAIK.”**

“DENGAN ADANYA DAMPINGAN DARI SOLUD, KAMI MENDAPATKAN BIMBINGAN DAN ARAHAN UNTUK RKAS. KOMUNITAS SEKOLAH DI SDN DADIBOU JUGA CUKUP AKTIF BERPARTISIPASI DALAM DISKUSI PENGEMBANGAN SEKOLAH. KAMI JUGA BERHASIL MEMBANGUN LAPANGAN VOLI DI SEKOLAH, SELAIN UNTUK MENUNJANG KEBUTUHAN SISWA, JUGA UNTUK AKTIVITAS PARA WARGA SEKITAR.”



Kepala Sekolah SDN di Kab. Bima



Kepala Sekolah SDN di Kab. Bima

“DENGAN ADANYA DAMPINGAN DAN BENTUKAN KOMUNITAS SEKOLAH, SEKOLAH KAMI MENDAPATKAN BANTUAN PEMBANGUNAN RUANG KELAS RUSAK DAN TOILET DARI DANA DAK.”



Kegiatan Rehab di SDN di Kabupaten Sambas



Kegiatan Berkebun di SDN di Kabupaten Sambas



Kegiatan Menenun salah satu Ibu Komunitas Sekolah di Sumba Barat.





Kegiatan Pertemuan Komunitas Sekolah di SDN di Kab. Bima.

**“PRAKTIK-PRAKTIK KOLABORASI
MASYARAKAT DALAM PROGRAM
INI SEHARUSNYA MENJADI
PEMBELAJARAN BAGI PEMERINTAH
UNTUK MENDORONG PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN
TANPA MENGURANGI TANGGUNG
JAWAB PEMERINTAH SEBAGAI
PENANGGUNG JAWAB LAYANAN
TERSEBUT.”**



Kegiatan Monitoring PIP dengan salah satu orang tua di SDN, Kab. Sumba Barat



Kegiatan Membuat Pagar dengan Komunitas Sekolah di SD Inpres di Sumba Barat.



Ibu-ibu Komunitas Sekolah SDN di Kabupaten Sambas.



Ibu-ibu Komunitas Sekolah SDN di Kabupaten Sambas.





Sekolah Inklusif

**“ADANYA PERBEDAAN
TIAP ANAK SEHARUSNYA
MENJADI PENGUAT DALAM
MENINGKATKAN MUTU
PENDIDIKAN. SEKOLAH
DAN GURU SEBAGAI UJUNG
TOMBAK HARUS MAMPU
MERESPON KEBUTUHAN
PEMBELAJARAN YANG
BERBEDA, SEHINGGA
SEKOLAH BISA DINIKMATI
OLEH SEMUA ANAK.”**

Program Pro-InQluEd YAPPIKA-ActionAid merupakan program kerja sama YAPPIKA-ActionAid dengan Uni Eropa yang bertujuan mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pendidikan dasar yang bermutu dan bisa diakses oleh semua anak melalui penguatan partisipasi masyarakat tanpa terkecuali. Hal ini seperti yang sudah diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 pasal 5 ayat 1 mengenai sistem pendidikan nasional bahwa “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”.

Berdasar atas kondisi tersebut, oleh karenanya setiap anak mempunyai hak yang sama untuk tidak didiskriminasikan dan memperoleh pendidikan yang bermutu. Semua anak juga mempunyai kemampuan untuk mengikuti pelajaran tanpa melihat kelainan dan kecacatannya, Adanya perbedaan tiap anak seharusnya menjadi penguat dalam meningkatkan mutu pembelajaran bagi semua anak. Sekolah dan guru sebagai penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik sudah semestinya mempunyai kemampuan untuk belajar merespon dari kebutuhan pembelajaran yang berbeda. Dengan kata lain, pihak sekolah



Kegiatan Belajar Daring ABK di SDN di Kab. Sumba Barat



Siswa SDN di Kab. Sumba Barat memperoleh KIP



Kegiatan Sosialisasi PIP dengan orang tua siswa SDN di Kab. Sumba Barat

sudah semestinya menyelenggarakan pendidikan inklusif atau disebut juga dengan sekolah inklusif.

Definisi pendidikan inklusif berdasarkan Permendiknas 70 Tahun 2009 merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik

pada umumnya. Sekolah inklusif merupakan perkembangan baru dari pendidikan terpadu. Pada sekolah inklusif setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya, semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi dan atau penyesuaian, mulai dari kurikulum, sarana dan prasarana, tenaga pendidikan dan kependidikan, sistem pembelajaran sampai pada sistem penilaiannya.

Dalam program yang sudah dilaksanakan sejak pertengahan tahun

2018 ini tentunya memiliki kategori Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dalam pendidikan inklusif. Mereka adalah anak atau siswa penyandang disabilitas dengan berbagai hambatan; anak putus sekolah dan anak tidak sekolah yang disebabkan oleh berbagai latar belakang masalah; peserta didik Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; dan, anak-anak yang bermasalah dengan hukum.

Melalui strategi-strategi berupa advokasi kebijakan, pengorganisasian komunitas, kampanye publik, dan kolaborasi dengan stakeholder di daerah, program yang sudah berjalan hampir 3,5 tahun ini setidaknya sudah dapat menjadi wadah bagi sekolah yang sebelumnya memiliki kendala dalam hal mengakses pendidikan yang berkualitas. Mulai dari infrastruktur, kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi mereka dalam memajukan kualitas pendidikan di sekolah, dan tentu juga penerapan konsep sekolah inklusif.

Beberapa anak berkebutuhan khusus yang terdapat di wilayah intervensi program saat ini sudah bisa mengakses pendidikan dengan aman dan berkualitas.

Hal ini dapat kita lihat dari sejauh mana penggunaan kartu PIP (Program

Indonesia Pintar) bagi anak yang memiliki permasalahan ekonomi ataupun bagi mereka yang putus sekolah karena permasalahan ekonomi. Tentunya dalam mengakses kartu tersebut harus dikelola dan dipantau dengan baik, agar program yang berjalan sudah tepat sasaran. Dalam artian bahwa baik sekolah dan pemerintah desa harus terlibat memilah siapa yang berhak dan tidak sebagai penerima manfaat dari kartu PIP ini.

Selain PIP, beberapa anak dengan disabilitas juga sudah terakomodir dengan baik di sekolah-sekolah yang menjadi dampingan program Pro-InQluEd. Mereka sudah belajar bersama dengan para anak didik umum di satu kelas yang sama tanpa ada kekhawatiran akan diskriminasi. Namun, di masa pandemi ini mereka masih belajar secara daring di rumah mereka masing-masing. Atau, pihak guru yang mendatangi ke titik kumpul yang sudah disepakati bersama. ■





Kegiatan Pengambilan dana KIP di SDN di Kab. Sumba Barat



Kegiatan Pengambilan dana KIP di SDN di Sumba Barat.



Siswi dan Kegiatan Belajar Mengajar di SDN di, Kab. Sambas



Kegiatan Belajar Mengajar SDN di Kabupaten Sambas





**“SAYA TIDAK MEMILIKI
PENGALAMAN DAN
PENGETAHUAN DALAM
MENDAMPINGI KEPONAKAN
YANG BERKEBUTUHAN
KHUSUS. UNTUNGNYA
DI SEKOLAH PARA GURU
MEMAHAMI **ABK** SEHINGGA
SAYA SANGAT TERBANTU.”**



Siswa dengan disabilitas di salah satu SDN di Kab. Bima.



Siswa dengan disabilitas di salah satu SDN di Sumba Barat



Siswa dengan disabilitas di SDN di Sumba Barat



Siswa dengan disabilitas di SDN di Kab. Sambas





Siswa-siswi di salah satu SDN di Kab. Sumba Barat



Siswa-siswi dan guru di salah satu SDN di Sumba Barat

Pembelajaran Masa Pandemi





**“PEMBELAJARAN JARAK
JAUH (DARING) MUNGKIN
BISA BERJALAN DI KOTA, TAPI
SUSAH DITERAPKAN DI DESA-
DESA YANG MINIM JARINGAN
INTERNET. BELUM LAGI
UNTUK RUMAH TANGGA DARI
GOLONGAN EKONOMI BAWAH,
BIAYA UNTUK GAWAI DAN
KUOTA SEMAKIN MEMBERATKAN
KELUARGA. AKHIRNYA, GURU-
GURU DI DESA HARUS MEMUTAR
OTAK DAN BERJIBAKU AGAR
ANAK-ANAK DIDIKNYA TETAP
BISA BELAJAR.”**

Munculnya wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Wuhan, China, pada Desember 2019 ternyata mengubah seluruh tatanan negara-negara di dunia secara signifikan. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV-2) yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus sebagai penyakit menular ke manusia. Virus ini menyerang siapa saja mulai dari bayi, anak-anak hingga orang dewasa. Proses penyebaran yang sangat cepat membuat seluruh negara di dunia termasuk Indonesia melakukan *lockdown* (tindakan darurat atau kondisi saat orang-orang untuk sementara waktu dicegah memasuki atau meninggalkan area atau bangunan yang telah ditentukan selama ancaman



Perilaku Mencuci Tangan siswa di SDN Kabupaten Sumba Barat.

bahaya berlangsung). Terhitung sejak 11 Maret 2020 WHO menetapkan wabah ini sebagai pandemi global.

Pemerintah Indonesia pun menerapkan beberapa kebijakan pembatasan sosial dari Maret 2020 hingga hari ini. Hal ini berdampak pada beberapa kegiatan-kegiatan yang menghasilkan kerumunan harus dihentikan, seperti sektor ekonomi mikro, pariwisata hingga pendidikan formal. Hanya beberapa aktivitas-aktivitas prioritas saja yang masih diperbolehkan tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat.

Di sektor pendidikan, beberapa daerah dengan angka COVID-19 tinggi terpaksa harus melakukan kegiatan pembelajaran di rumah. Terlebih adanya Surat Edaran No. 4 Tahun 2020 dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menganjurkan seluruh kegiatan di institusi pendidikan harus jaga jarak dan seluruh penyampaian materi akan disampaikan di rumah masing-masing. Metode daring (dalam jaringan/ online) pun menjadi salah satu alternatif dalam pembelajaran di sekolah. Murid menggunakan beberapa aplikasi seperti Google Meet, Zoom, dll untuk pembelajaran secara daring dengan guru

di sekolah. Hal ini menjadi tantangan baru di dunia pendidikan.

Minimnya Faktor

Penunjang Pembelajaran

Segala sektor terkena dampak di masa pandemi. Tak terkecuali sektor pendidikan. Pertama, untuk melakukan kegiatan pembelajaran secara daring, murid dan guru diharuskan memiliki sejumlah perangkat seperti laptop ataupun handphone sebagai alat utama pembelajaran. Pelbagai fenomena pun terjadi seperti dilansir dalam berita tribunnews.com beberapa kasus terjadi, seperti seorang ayah di Garut yang kepergok mencuri handphone karena terpaksa untuk pembelajaran online sekolah anaknya, dan ada pula cerita tentang siswa SMP di Sumatera Barat yang tak mau sekolah karena tak mampu membeli kuota internet untuk pembelajaran online.

Kedua, di masa darurat setiap institusi dituntut untuk berinovasi dalam pembelajaran daring guna tercapainya tujuan pembelajaran. Sayangnya, tak semua institusi mampu memahami

model pembelajaran daring ini, selain keterbatasan sarana, sumber daya manusia yang melek teknologi pun tidak cukup banyak. Seperti guru, mereka mau tak mau harus siap dan dituntut untuk menghadapi situasi ini dengan memikirkan ulang metode dan model pembelajaran secara daring serta menguasai perangkat *high technology* ini.

Lantas, bagaimanakah dengan daerah 3T (tertinggal, terluar, dan terdepan) atau daerah pelosok? Daerah-daerah 3T yang dinilai cukup rendah angka covid masih diperbolehkan untuk tatap muka. Namun, hal itupun tentatif sesuai situasi dan kebijakan pemerintah setempat. Beberapa daerah masih melakukan tatap muka dengan syarat protokol kesehatan yang ketat. Setiap murid diharuskan memakai masker. Sekolah-sekolah pun harus memiliki ketersediaan tempat mencuci tangan, sabun dan juga hand sanitizer. Bagi sebagian sekolah di pelosok daerah, untuk memperoleh alat prokes pun menjadi kendala utama. Hal ini dikarenakan pengadaan alat prokes hanya dapat diakses di kota.



Kegiatan Belajar Mengajar di SD Inpres di Kabupaten Sumba Barat.

Situasi ini menjadi sangat dilematis. Di satu sisi, pembelajaran harus berlanjut sedangkan di sisi lain murid dan siswa harus berhadapan langsung dengan virus yang tak terlihat dan sewaktu waktu dapat membahayakan nyawa mereka. Dengan demikian, hal tersebut cukup menjelaskan bahwa minimnya faktor penunjang cukup menghambat proses pembelajaran di sekolah.

Penguatan Masyarakat Sipil dibutuhkan

Pelbagai uraian di atas cukup memaparkan bahwa kendala yang dihadapi masyarakat cukup banyak dalam menghadapi situasi pandemi. Dalam sektor pendidikan formal di daerah-daerah ternyata bukan hanya berdampak pada guru dan siswa tetapi juga orangtua murid yang menginginkan anaknya mendapat pembelajaran dengan baik. Untuk itu, tak cukup dengan menyerahkan persoalan ini kepada pemerintah. Dibutuhkan kekuatan dan inisiatif masyarakat sipil untuk bahu membahu mengatasi kendala yang ada.

Sebagai contoh, YAPPIKA-ActionAid mendorong komunitas sekolah di beberapa daerah dampingannya untuk mendorong *awareness* masyarakat di situasi pandemi dengan menyebarkan



Kegiatan Belajar Mengajar di SDN Sumba Barat.



Kegiatan Belajar Mengajar di SDN Sumba Barat.

informasi melalui KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) dan mendorong komunitas sekolah untuk menyediakan beberapa titik tempat cuci tangan di sekolah. Komunitas Sekolah yang terdiri dari guru-guru di sekolah dan orang tua murid/ masyarakat sekitar turut serta dalam ruang-ruang diskusi dalam pembahasan terkait pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Pelibatan masyarakat sipil dinilai YAPPIKA-Actionaid sangat penting untuk merespon bencana (dalam hal ini pandemi). Hal ini dikarenakan dalam

kondisi darurat, bencana harus direspon cepat untuk mengurangi resiko-resiko yang terjadi. Jika hanya berpangku tangan kepada pemerintah yang sering kali lamban, maka kekuatan masyarakat sipil harus bisa jadi andalan. Tabik! ■



UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur yang dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya serangkaian proses pembuatan *Photobook* berjudul **Menapak Asa Pendidikan Inklusif dari Tepian Nusantara** telah berhasil diselesaikan dengan baik di tengah situasi pandemi saat ini.

Sehubungan dengan telah diselesaikannya buku ini, tim program Pro-InQluEd ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya ke berbagai pihak, yaitu:

1. European Union Delegation, atas Kerjasama dan kepercayaan kepada YAPPIKA-ActionAid dan para mitranya dalam melaksanakan program.
2. Direktur Eksekutif YAPPIKA-ActionAid yang selalu menjadi pembimbing dan pencerah bagi kami pelaksana program
3. Direktur Lembaga Gemawan, Ketua Perkumpulan SOLUD, dan Direktris Yayasan Bahtera yang telah bekerja sama dengan baik, kompak, dan saling mendukung pelaksanaan program maupun dalam pembuatan buku ini.
4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas kerjasamanya selama program ini dilaksanakan

5. Para Anggota Komunitas Sekolah di 3 daerah program (Kabupaten Sambas, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Sumba Barat) yang sangat luar biasa dan konsisten dalam bersama-sama mengawal perubahan kurang lebih selama 3 tahun dalam mengikuti semua aktivitas program
6. Jaringan OMS baik di nasional maupun daerah yang juga sudah terlibat dalam berbagai aktivitas pada program Pro-InQluEd
7. Media nasional maupun lokal yang selalu senantiasa mengkampanyekan isu pendidikan inklusi
8. dan, para pihak yang tak bisa kami sebutkan satu per satu.

Atas segala kekurangan dalam proses pembuatan buku ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian ucapan terima kasih yang dapat kami sampaikan.

Hormat kami,

Tim Pro-InQluEd
YAPPIKA-ActionAid

MITRA PROGRAM PRO-INQLUED



Tim Gemawan



Tim Bahtera



Tim Solud



Publikasi ini diproduksi atas dukungan dari European Union dan kolaborasi dengan YAPPIKA-ActionAid. Seluruh isi publikasi ini merupakan tanggung jawab YAPPIKA-ActionAid dan tidak mencerminkan pandangan dari European Union maupun pihak lainnya.



Co-Funded by
the European Union



Member of
act:onaid